



Original Article

Pengaruh Pelatihan Aparatur Desa, Ketersediaan Fasilitas Teknologi dan Pendampingan Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ponrang Selatan

Nur Hijerah^{1✉}, Sahrir², Andi Dahri Adi Patra³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo

Correspondence Author: nurhijera79@gmail.com[✉]

Abstract:

Village fund management has become a crucial issue in Indonesia's rural development agenda, particularly following the enactment of Law No. 3 of 2024 on Village Fund Management, which mandates transparent and accountable financial governance. However, implementation challenges persist, including delayed financial reporting, limited transparency, and suspected fund misuse, particularly in South Ponrang District. This study aims to comprehensively examine the influence of village apparatus training, technology facility availability, and government assistance on village fund management accountability using a quantitative approach. The research employed an associative-causal design with a saturated sampling technique, involving 58 respondents comprising village heads, secretaries, treasurers, and staff involved in village financial management in South Ponrang District, Luwu Regency, South Sulawesi. Data were collected through structured questionnaires and analyzed using descriptive statistics, validity and reliability tests, multiple linear regression, t-tests, F-tests, and coefficient of determination. The findings reveal that technology facility availability and government assistance have significant positive effects on village fund management accountability, while village apparatus training shows no significant influence. The regression model explains 96.4% of accountability variations with an R^2 value of 0.964. The study concludes that investment in technological infrastructure such as computers, Siskeudes applications, and internet access, combined with intensive government assistance programs, are key factors in enhancing transparency and accountability in village fund management, while formal training programs require substantial evaluation and improvement.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Keywords: Accountability, Government Assistance, Technology Facilities, Village Apparatus Training, Village Fund Management

Introduction

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu program yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dana Desa yang mencakup sumber pendapatan desa, tata kelola keuangan, dan akuntabilitasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan dana desa menjadi topik penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Dana desa yang dialokasikan melalui (APBD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa serta mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun, meskipun potensi dana desa ini sangat besar dalam memperbaiki kualitas hidup dalam masyarakat pedesaan, tantangan terkait akuntabilitas pengelolaannya masih menjadi perhatian utama. Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan dana desa merujuk pada transparansi, keterbukaan, serta tanggung jawab aparatur desa dalam penggunaan dana untuk kepentingan public.

Namun, dalam implementasinya di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Ponrang Selatan, masih ditemukan berbagai fenomena kelemahan dalam pengelolaan dana desa, seperti keterlambatan pelaporan keuangan, kurangnya transparansi kepada masyarakat, hingga dugaan penyalahgunaan dana. Beberapa desa mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dan sesuai regulasi dan terbatasnya pemahaman aparatur terhadap sistem akuntansi desa. Selain itu, tidak semua desa memiliki akses atau kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangannya. Keberadaan komputer, akses internet dan aplikasi seperti siskeudes belum merata penggunaannya, sehingga pengelolaan masih dilakukan secara manual dan beresiko tinggi terhadap kesalahan administratif. Di sisi lain, pendampingan dari pemerintah daerah atau pusat belum sepenuhnya menjangkau semua desa secara optimal, baik dari segi frekuensi maupun kualitas bimbingan teknis. Fenomena-fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia dan anggaran telah dikucurkan, akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya tercapai secara merata di lapangan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi isu yang krusial karena menyangkut anggaran pengelolaan yang signifikan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai factor yang memengaruhi sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai. Salah satunya adalah Kualitas pelatihan yang diterima oleh aparatur desa. Pelatihan yang efektif mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami peraturan, tata kelola keuangan, serta prosedur pelaporan yang diperlukan. Menurut ([Kuncahyo & Dharmakarja, 2022](#)) Aparat desa yang memiliki Pelatihan akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan keuangan, sehingga pelatihan yang sistematis sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur desa menjadi salah satu kendala utama yang menghambat dana desa akuntabel. Penelitian lain oleh Purba (2020) juga menemukan bahwa pemahaman dan peran perangkat desa yang diperoleh melalui pelatihan berhubungan positif dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, program pelatihan yang berkelanjutan terarah sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, ketersedianya fasilitas teknologi juga berperan penting. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi instrument vital dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi, seperti perangkat keras dan lunak serta akses internet, menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem informasi keuangan desa yang transparan dan efisien. Teknologi memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat dan pemerintah Penelitian oleh ([Pahlawan et al., 2020](#))

menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas teknologi, seperti sistem informasi keuangan desa, secara signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lain oleh [\(Deviyanti & Wati, 2022\)](#) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, bersama dengan kompetensi pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat, memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya alat bantu administrative, tetapi juga instrument penting dalam memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Tidak kalah pentingnya adalah peran pendampingan dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendampingan ini berfungsi untuk memberikan arahan, pengawasan, serta dukungan teknis yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa. Penelitian oleh [\(Dewi & Dewi, 2021\)](#) menemukan bahwa pendampingan yang efektif dapat meningkatkan kompetensi aparatur desa, membantu mereka mengetahui tauran yang berlaku, dan menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih baik. Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait, seperti kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, memberikan arahan dan supervisi untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tanpa pendampingan yang memadai, terdapat resiko penyimpanan atau inefisiensi dalam penggunaan dana desa, yang pada akhirnya dapat merusak tujuan dari alokasi dana tersebut.

Oleh karena itu, penelitian mengenai Pengaruh pelatihan aparatur desa, ketersediaan fasilitas teknologi, dan pendampingan pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat relevan dalam konteks pengembangan kebijakan publik di Indonesia. Akuntabilitas mencerminkan bahwa aparatur desa telah menjalankan tugasnya dengan benar, etis dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa. Dengan kata lain, akuntabilitas berperan sebagai tolak ukur yang menilai sejauh mana aparatur desa bertanggung jawab atas pekerjaan mereka [\(Dewi & Gayatri, 2019\)](#). memahami bagaimana ketiga faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi Terhadap peningkatan akuntabilitas adalah langkah penting dalam menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara konferensif pengaruh pelatihan aparatur desa, ketersediaan fasilitas teknologi, dan pendampingan pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan pendekatan kuantitatif. Secara spesifik, bertujuan untuk menilai sejauh mana pelatihan yang diberikan aparatur desa mampu meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam mengelola dana desa secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengeksplorasi peran ketersediaan fasilitas teknologi dalam memperlancar proses pencatatan, pelaporan dan pengelolaan keuangan desa, serta bagaimana teknologi tersebut berkontribusi terhadap akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur pengaruh pendampingan dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa secara akuntabel.

Penelitian ini memiliki kebaruan dan urgensi yang signifikan dalam konteks tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengharuskan implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan tiga dimensi kunci—pelatihan aparatur, fasilitas teknologi, dan pendampingan pemerintah—dalam satu model analisis komprehensif untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang belum banyak diteliti secara simultan dalam konteks geografis spesifik Kecamatan Ponrang selatan.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat alokasi dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah, sementara kasus-kasus penyalahgunaan dana desa masih kerap terjadi di berbagai daerah, sehingga diperlukan identifikasi faktor-faktor determinan yang dapat meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan. Selain itu, percepatan digitalisasi pemerintahan desa melalui aplikasi Siskeudes dan platform teknologi lainnya menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ketersediaan fasilitas teknologi berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang beragam seperti di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep akuntabilitas sektor publik di tingkat desa, sekaligus menyediakan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembinaan aparatur desa, investasi infrastruktur teknologi, dan program pendampingan yang lebih efektif untuk memastikan dana desa benar-benar dimanfaatkan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah.

Methods

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif atau kausal, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengujian hipotesis, pengukuran variabel dengan angka, serta analisis statistik untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ([Sugiyono, 2018](#); [Creswell, 2014](#)). Desain asosiatif atau kausal ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel independen (pelatihan, fasilitas, teknologi, dan pendampingan pemerintah) dapat memengaruhi variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa). Pendekatan ini selaras dengan prinsip penelitian yang berupaya menjelaskan fenomena sosial melalui identifikasi hubungan antarvariabel, sebagaimana ditekankan oleh Hair et al. (2019) dalam konteks penelitian bisnis dan sosial.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kecamatan ini terdiri dari beberapa desa yang telah menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan tingkat desa. Setiap desa di kecamatan ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana desa tersebut secara akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan teknik Sampling Jenuh, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik ini, juga dikenal sebagai sensus, diterapkan ketika populasi relatif kecil atau semua anggota populasi memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian ([Sudaryono, 2017](#); [Etikan & Bala, 2017](#)). Dalam konteks penelitian ini, total 58 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta staf lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Ponrang Selatan dijadikan sampel. Pemilihan teknik ini memastikan bahwa semua pihak yang relevan dan memiliki kapabilitas dalam pengelolaan dana desa terwakili dalam penelitian, sehingga data yang dikumpulkan dapat mencerminkan kondisi populasi secara keseluruhan.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner ini dirancang dengan menggunakan skala tertentu, yang memungkinkan pengukuran variabel secara kuantitatif. Penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data primer dinilai efektif untuk menjangkau responden secara sistematis dan mengumpulkan data yang seragam, terutama dalam konteks penelitian kuantitatif ([Emzir, 2015](#); [Babbie, 2016](#)). Kuesioner ini mencakup pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan variabel penelitian: Pelatihan Aparatur Desa, yang menurut modul

Kemendes (Kementerian Desa PDTT, 2024), dirancang untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik yang akuntabel; Ketersediaan Fasilitas Teknologi, yang menurut World Economic Forum (2021) merupakan pilar utama ekonomi digital inklusif; Pendampingan Pemerintah, yang menurut Kemendagri (2022) bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), yang menurut Fifqiazah & Rizka (2021) sangat penting untuk memastikan pemanfaatan dana sesuai tujuan dan mencegah penyalahgunaan.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan beberapa teknik statistik. Pertama, Analisis Deskriptif akan digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik data yang ada, sehingga membantu dalam memahami kondisi yang sedang berlangsung. Hasil analisis ini dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis, grafik, diagram, atau visualisasi lain yang mudah dipahami, guna memberikan ringkasan data yang efektif ([Sarwono, 2019](#); [Hair et al., 2019](#)). Kedua, Uji Validitas dan Reliabilitas akan dilakukan untuk memastikan kualitas data. Uji validitas akan menggunakan korelasi Pearson, sementara uji reliabilitas akan menggunakan Cronbach's Alpha. Kedua uji ini esensial untuk menjamin bahwa instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (validitas) dan memberikan hasil yang konsisten (reliabilitas), sebagaimana ditekankan oleh Malhotra (2019) dan Sugiyono (2018).

Selanjutnya, Uji Hipotesis akan dilakukan menggunakan Uji t untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dan Uji f untuk menguji signifikansi pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F juga berguna dalam konteks analisis regresi untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan ([Ghozali, 2018](#)). Terakhir, Uji Determinasi (R^2) akan digunakan untuk mengukur seberapa baik variabel independen dalam model regresi menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model lebih baik dalam menjelaskan data ([Hair et al., 2019](#)). Rangkaian analisis ini akan memungkinkan penarikan kesimpulan yang kuat mengenai hubungan kausalitas antarvariabel penelitian.

Results

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item variabel	Correlation (r-hitung)	r-tabel	keterangan
1.	Pelatihan Aparatur Desa	X1.1	0,894	0,258	Valid
		X1.2	0,825	0,258	Valid
		X1.3	0,814	0,258	Valid
		X1.4	0,860	0,258	Valid
		X1.5	0,757	0,258	Valid
2.	Ketersediaan Fasilitas Teknologi	X2.1	0,792	0,258	Valid
		X2.2	0,572	0,258	Valid
		X2.3	0,781	0,258	Valid
		X2.4	0,665	0,258	Valid

	X2.5	0,628	0,258	Valid
	X2.6	0,745	0,258	Valid
3. Pendampingan Pemerintah	X3.1	0,717	0,258	Valid
	X3.2	0,882	0,258	Valid
	X3.3	0,603	0,258	Valid
	X3.4	0,739	0,258	Valid
	X3.5	0,749	0,258	Valid
	X3.6	0,711	0,258	Valid
4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y1	0,683	0,258	Valid
	Y2	0,670	0,258	Valid
	Y3	0,744	0,258	Valid
	Y4	0,729	0,258	Valid
	Y5	0,782	0,258	Valid
	Y6	0,669	0,258	Valid
	Y7	0,678	0,258	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS V25.0,2019

Berdasarkan tabel 1. hasil uji validitas, dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dalam kuersioner memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel 5% yaitu 0,258 maka seluruh item pernyataan dianggap valid atau sah. metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel dan indikatornya.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Pelatihan Aparatur Desa	.884	Reliabel
2.	Ketersediaan Fasilitas Teknologi	.789	Reliabel
3.	Pendampingan Pemerintah	.830	Reliabel
4.	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	.824	Reliabel

Berdasarkan Tabel 2 uji reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi. Hal ini tercermin dari nilai Cronbach's Alpha yang semuanya berada di atas ambang batas 0,70, sebagaimana disarankan oleh Ghazali (2021). Variabel Pelatihan Aparatur Desa memperoleh nilai sebesar 0,884, menunjukkan reliabilitas yang sangat kuat. Ketersediaan Fasilitas Teknologi memiliki nilai 0,789, yang juga menunjukkan reliabilitas yang memadai. Sementara itu, Pendampingan Pemerintah dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa masing-masing mencatatkan nilai 0,830 dan 0,824, keduanya termasuk dalam kategori reliabel. Dengan demikian, seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan dapat dipercaya.

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	58	25.00	35.00	29.8448	3.12770
Pelatihan Aparatur Desa	58	13.00	25.00	20.2069	3.07656
Ketersediaan Fasilitas Teknologi	58	18.00	30.00	24.2241	2.82869
Pendampingan Pemerintah	58	20.00	30.00	25.2759	3.11078
Valid N (listwise)	58				

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif diatas dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa nilai rata-rata adalah 29,84 yang menunjukkan nilai tengah dari responden, kemudian nilai 25 hingga 35 menunjukkan bahwa ada responden yang memberikan nilai terendah dan tertinggi pada variabel tersebut. Selanjutnya nilai pelatihan aparatur desa, rata-rata nilai 20,20 nilai terendah 13 dan nilai tertinggi 25 dan standar deviasi 3,07 menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki nilai pelatihan yang sedang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan individu dalam hal penekanan pada pelatihan dipengaruhi oleh Pendidikan dan pengalaman hidup. Ketersediaan fasilitas teknologi nilai rata-ratanya adalah 24,22 dengan nilai minimum 18 dan maksimum 30 serta standar deviasi 2,82 ini menunjukkan bahwa secara umum desa memiliki ketersediaan fasilitas yang sedang yang artinya fasilitas di desa belum memadai. Selanjutnya, pendampingan pemerintah dengan nilai rata-rata 25,27 dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 30 dan standar deviasi 3,11 menunjukkan bahwa pendampingan dari pemerintah masih di tingkat sedang. Ini menunjukkan bahwa aparatur desa masih butuh pendampingan yang semaksimal mungkin.

Uji Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji f, dan Uji Determinasi

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji f, dan Uji Determinasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	t tabel	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	3.789	.963		3.933	2,003	.000
Pelatihan Aparatur Desa	-.018	.139	-.018	-.130	2,003	.897
Ketersediaan Fasilitas Teknologi	.590	.104	.533	5.649	2,003	.000
Pendampingan Pemerintah	.480	.134	.478	3.591	2,003	.001

Adjusted R Square	.964
Sig. F	<.000 ^b

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil Output SPSS V25.0,2019

Hasil pada tabel 4 di atas persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 3,789 - 0,018X_1 + 0,590X_2 + 0,480X_3$$

Berdasarkan tabel 4 hasil yang diperoleh dari persamaan regresi linear berganda menunjukkan besarnya arah hubungan pada masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Nilai Konstanta sebesar 3,789 menunjukkan bahwa semua variabel independent pelatihan aparatur desa, ketersediaan fasilitas teknologi, dan pendampingan pemerintah bernilai 0, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan bernilai 3,789. Kemudian uji hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel dan nilai t-sig dengan $\alpha: 0,05$. apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $t\text{-sig} < \alpha: 0,05$ maka diterima H_1 atau tolak H_0 . Sebaliknya, apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $t\text{-sig} > \alpha: 0,05$ maka tolak H_1 atau terima H_0 .

Variabel X_1 Pelatihan Aparatur Desa, nilai B sebesar -0,018 dan nilai beta sebesar -0,018 dengan nilai signifikansi 0,897 ($>0,05$) dan nilai $t -0,130 < 2,003$ menunjukkan bahwa H_1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan $>0,05$. Variabel X_2 Ketersediaan Fasilitas Teknologi, nilai B sebesar 0,590 dan nilai beta sebesar 0,533 dengan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$) dan nilai $t 5,649 > 2,003$ menunjukkan bahwa H_2 memiliki pengaruh positif signifikan terbesar. Ketersediaan fasilitas teknologi merupakan factor yang paling berpengaruh. Variabel X_3 Pendampingan Pemerintah, nilai B sebesar 0,480 dan nilai beta sebesar 0,478 dengan nilai signifikan 0,001 ($<0,05$) dan nilai $t 3,591 > 2,003$ menunjukkan bahwa H_3 juga berpengaruh positif signifikan.

Kemudian dapat dilihat pada tabel 5. nilai sig F $<0,000$ menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara keseluruhan. artinya secara bersama-sama variabel independent memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai Rsquare yang telah disesuaikan untuk penelitian ini ada pada tabel 5. sebesar 0,964 menunjukkan bahwa 96,4% variasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan pada variabel independent dalam model ini. sisanya 3,6% dijelaskan oleh factor lain diluar model yang tidak diteliti.

Pembahasan

1. Pengaruh Pelatihan Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan aparatur desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. H_1 ditolak, kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kualitas pelatihan yang diberikan belum memadai, baik dari segi materi, durasi, maupun metode pelaksanaannya. Banyak pelatihan bersifat formalitas dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata lapangan. Kedua, kurangnya implementasi hasil pelatihan juga menjadi faktor penghambat. Hasil ini sejalan dengan penelitian ([Latif & Savitri, 2021](#)) yang menunjukkan bahwa pelatihan bagi aparatur desa tidak memiliki dampak signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Meskipun pelatihan telah diberikan, aparatur desa mungkin belum mampu menerapkannya secara langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan analisis, pelatihan tidak menjadi faktor utama dalam penyusunan laporan keuangan desa, karena dengan pendidikan tingkat menengah, pengalaman, dan kompetensi yang terbatas, aparatur desa masih dapat menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah daerah bersama dengan aparatur pengawas daerah secara aktif memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan guna meningkatkan akuntabilitas aparatur desa.

Oleh karena itu, meskipun latar belakang pendidikan tidak selalu relevan dengan bidang pencatatan dan pelaporan keuangan desa, aparatur tetap mampu beradaptasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Saat ini, syarat untuk menjadi pengelola keuangan desa hanya sebatas memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat tanpa ketentuan khusus mengenai keahlian dalam mengelola keuangan. Hal ini sejalan dengan permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa perangkat desa minimal berpendidikan SMA. ([Astini et al., 2019](#)) juga menyatakan bahwa pengalaman aparatur desa tidak menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa, karena adanya pendampingan yang diberikan kepada mereka.

Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode dan materi pelatihan, serta penyelarasan dengan kebutuhan nyata dan kemampuan aparatur desa agar pelatihan benar-benar dapat meningkatkan akuntabilitas.

2. Pengaruh Ketersediaan Fasilitas Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketersediaan fasilitas teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis H2 diterima. Ini menunjukkan semakin baik fasilitas teknologi semakin baik juga akuntabilitas. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang efisien, akurat, dan transparan. Penggunaan perangkat keras seperti komputer serta perangkat lunak misalnya aplikasi (Siskeudes), sangat membantu dalam pencatatan keuangan secara digital, pelaporan secara real-time, dan akses informasi yang lebih terbuka bagi publik.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, menunjukkan bahwa sebagian kantor desa telah dilengkapi dengan perangkat komputer serta didukung dengan akses internet. Hal ini memungkinkan percepatan dalam proses penyusunan dan pengiriman laporan keuangan, serta memudahkan pengawasan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan ([Aziiz & Prastiti, 2019](#)) yang menyatakan bahwa penggunaan internet mempermudah sistem administrasi keuangan.

Sementara itu, website digunakan sebagai sarana akuntabilitas dalam menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk laporan pertanggungjawaban. Namun demikian, masih ditemukan beberapa desa yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal, khususnya dalam hal penggunaan website desa sebagai media publikasi informasi keuangan dan program kerja. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital dan pelatihan teknis penggunaan teknologi bagi aparatur desa.

3. Pengaruh Pendampingan Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. H3 diterima, ini mengindikasikan peran vital pendampingan dalam pengelolaan dana, efektivitas program pendampingan pemerintah, pentingnya monitoring dan evaluasi dan dukungan pemerintah berdampak positif. Pendampingan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas karena memberikan panduan, pengawasan, dan penguatan kapasitas aparatur desa. Menurut ([Pratiwi & Muliastari, 2020](#)) Pendampingan merupakan hal yang paling penting karena peserta didampingi dalam penyusunan laporan keuangan desa sampai mereka paham. Ketika perangkat desa mendapatkan pendampingan yang baik, mereka akan lebih memahami

prosedur pengelolaan keuangan yang benar dan penting transparasinya.

Permendagri No. 84 tahun 2015 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan (Faizah & Sari, 2022). Dalam regulasi tersebut, pendampingan menjadi alat penting untuk mengurangi resiko penyimpangan, korupsi, atau penyalahgunaan dana desa yang jumlahnya cukup besar dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendampingan juga membantu memastikan prinsip good governance diterapkan dalam pemerintahan desa, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Melalui kegiatan pendampingan yang terjadwal secara rutin, pemerintah pusat dan daerah dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi ditingkat desa secara lebih dini dan menyusun solusi atau kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan dana desa lebih efektif dicapai melalui kombinasi ketersediaan teknologi yang memadai dan pendampingan pemerintah yang intensif, sementara pelatihan formal aparatur desa bukan menjadi factor utama. Fokus utama sebaiknya diberikan pada penyediaan infrastruktur teknologi dan program pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan.

Conclusion

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap 58 responden aparatur desa di Kecamatan Ponrang Selatan, penelitian ini menemukan bahwa ketersediaan fasilitas teknologi dan pendampingan pemerintah terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai R^2 sebesar 0,964 yang menunjukkan model penelitian mampu menjelaskan 96,4% variasi akuntabilitas, sementara pelatihan aparatur desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa investasi pada infrastruktur teknologi seperti komputer, aplikasi Siskeudes, dan akses internet, serta intensifikasi program pendampingan dari pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup geografis yang terbatas pada satu kecamatan, penggunaan teknik sampling jenuh yang membatasi generalisasi hasil, serta fokus pada aspek kuantitatif tanpa mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor kualitatif yang mungkin mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.

Suggestion

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan geografis dengan melibatkan multiple kecamatan atau kabupaten, mengintegrasikan pendekatan mixed-method untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika pengelolaan dana desa, serta menambahkan variabel moderasi seperti karakteristik demografis aparatur desa, tingkat partisipasi masyarakat, dan faktor budaya lokal yang dapat memengaruhi hubungan antara variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan dapat diimplementasikan secara luas dalam konteks pembangunan desa di Indonesia.

References

- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran,

- Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy*, 266–284. <https://antikorupsi.org>
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati. (2019). Determinan yang mempengaruhi berhasilnya pengelolaan keuangan desa. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(1), 29.
- Aziiz, Prastiti, D. S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Babbie, E. R. (2016). *The practice of social research* (14th ed.). Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Deviyanti, N. K., & Wati, N. W. A. E. (2022). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 36–48. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2547>.
- Dewi, L. P. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Peran Pendamping Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(01), 820–829.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Efendi, H., Takdir Syaifuddin, D., & Nur, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Dimediasi Kompetensi Aparatur pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. *Action Research Literate*, 8(6). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.413>.
- Emzir. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Etikan, I., & Bala, K. (2017). Sampling and sampling methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6), 00149.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Fifqiazah & Rizka. (2021). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Fifqiazah, D., & Rizka, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Makmur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 159–173.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Intan, Sahrir, & Pratiwi, I. (2024). Transparency, Accountability and Community Participation in Financial Management of Village Funds in Bua District. *Proceedings Series on Proceedings of Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 1222–1229.
- Julianto, I Putu; Dewi, G. ayu K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta

- Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *4*(1), 24–42.
- Jumame, S. T., Jitmau, F., & Siwolo, Y. A. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Kampung Miskum Distrik Klaso Kabupaten Sorong. *Jurnal Pitis AKP*, *4*(2), 1–6. <https://www.poltekstpaul.ac.id/jurnal/index.php/jakp/article/view/390>
- Kemendagri (2022). (2022). Pedoman umum pendampingan pemerintah dalam pengelolaan dana desa. *Sustainability(Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Kementerian desa PDTT. (2024). Peraturan menteri desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024. 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, *1*(4), 299–319. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316>
- Latif, A., & Savitri, E. (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Effect Of Accountability, Tranparency And Quality Of Human Resource On Village Financial Management (Empirical Study On Village Government In Solok Regency, West Sumatra). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(2), 183–192. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Ningsih, W. S. (2020). Analisis Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. In *European Journal of Social Psychology* (Vol. 30, Issue 5, pp. 613–630). [https://doi.org/10.1002/1099-0992\(200009/10\)30:5<613::aid-ejsp11>3.3.co;2-j](https://doi.org/10.1002/1099-0992(200009/10)30:5<613::aid-ejsp11>3.3.co;2-j)
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, *2*(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pratiwi, D. N., & Mulasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, *6*(2), 158–162. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506>
- Rijal, M. S., Handayani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Accountability, Transparency, Community Participation and Management. *November*, 3301–3313.
- Sari, D. I., Tyasari, I., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desanya di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, *1*(1), 1–15. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i1.2>
- Sari, N., Handayani, S. W., Marlizar, D., Saputra, I. M., Sitompul, S. J., Ilmu, P., Negara, A., & Umar, U. T. (2025). Fasilitas aparatur desa pada penyusunan peraturan desa di kecamatan meurebo kabupaten aceh barat. *408–412*.
- Simanjuntak, M. F. E., & Hutabalian, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol dan Mengetahui Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social*

- Sciences (JEHSS)*, 3(2), 743–749. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.411>.
- Slamet Kuwat, D. maulana hasanuddin. (2021). pendampingan perancangan dan penganggaran desa di aceh selatan dan subulussalam.
- Susanti. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pendampingan Kampung dan Pemantauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *SNEBA, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 1, 79–86.
- Wiralestari, W., Sam, I., Lutfi, L., Fitriani, D., & Wendry, W. S. (2020). Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Mendalo Indah. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 206–210. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i2.10520>.